
**HUBUNGAN KETEPATAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL****Siswantoro***

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: Siswantoro27@students.unnes.ac.id

***Penulis Korespondensi**

ABSTRAK

Salah satu permasalahan utama di daerah tertinggal adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebagai instrumen pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan ketepatan pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan fungsi anggaran pada 122 daerah tertinggal di Indonesia dengan menggunakan tiga indikator indeks pembangunan manusia, meliputi indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator ekonomi, sebagai tolak ukur penilaian kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan model terpilih yaitu *fixed effect model*. Data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari 122 data daerah tertinggal dengan periode 4 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas pengeluaran pemerintah daerah menurut fungsi ekonomi sebesar 0.0473 lebih besar 5% dengan koefisien regresi tercatat sebesar 0,003102. Hasil statistik ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan ketepatan fungsi ekonomi pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal.

Kata Kunci: daerah tertinggal, kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia

**THE RELATIONSHIP OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET EXPENDITURES BY
FUNCTION AND THE WELFARE OF UNDERDEVELOPED REGIONAL
COMMUNITIES****ABSTRACT**

One of the main problems in underdeveloped areas is the low level of social welfare. To overcome this problem, the government allocates expenditure funds as a funding instrument to improve people's welfare. The aim of the study was to determine the relationship between the accuracy of government budget spending by function in 122 underdeveloped regions in Indonesia with using the three indicators of the human development index (IPM) (indicators of health, education, and economy) as benchmarks for assessing people's welfare. According to previous studies, the variables of poverty and population growth are also included in this study as control variables. This research method is a multiple linear analysis with the selected model, namely the fixed effect model. The data used is panel data which consists of 122 data in underdeveloped areas over a period of 4 years. The results showed that the probability value of local government spending according to the economic function was 0.0473 bigger 5% with a regression coefficient of 0.003102. The results of these statistics conclude that there is a correlation between the accuracy of the economic function of regional government budget spending which is significant for the welfare of disadvantaged areas.

Keywords: underdeveloped areas, poverty, population growth, government spending, human development index

PENDAHULUAN

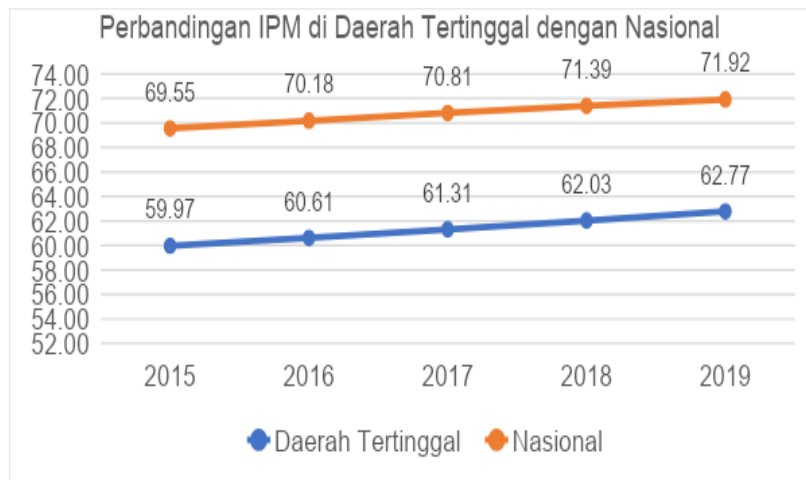
Isu kesejahteraan penduduk menjadi hal yang selalu menarik untuk dikaji karena hampir setiap pemerintahan negara di seluruh dunia menginginkan warganya hidup sejahtera. Salah satu metode yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga komponen utama, yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana suatu penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebagai efek dari hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2019). Semakin tinggi IPM di suatu negara menandakan bahwa pemerintah telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui proses pembangunan yang efektif.

Pertumbuhan IPM di Indonesia terlihat meningkat. Badan Pusat Statistik Indonesia (2019) mencatat bahwa IPM Indonesia selalu menunjukkan adanya peningkatan dalam 12 tahun terakhir. Jika pada 2010, Indonesia memiliki IPM sebesar 66,53, namun di tahun 2021 IPM Indonesia telah meningkat menjadi 72,29. Meskipun selalu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, IPM Indonesia masih tetap berada dalam kategori menengah dan bahkan berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2015 Indonesia hanya memiliki IPM sebesar 0,689 dan masuk pada kategori menengah. Di tingkat Asia Tenggara, IPM Indonesia menempati posisi ke lima, sementara dalam lingkup global berada pada peringkat 113 dari 188 negara (UNDP, 2015). Dengan merujuk pada data-data ini, tentu perlu kerja keras bagi pemerintah untuk meningkatkan IPM agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dengan baik.

Angka IPM Indonesia dapat lebih rendah di daerah-daerah tertinggal yang minim pembangunan dan infrastruktur. Data BPS Indonesia pada 2015-2019 menunjukkan bahwa daerah tertinggal memiliki IPM yang lebih rendah jika dibandingkan nasional. Memang rata-rata IPM di daerah tertinggal pada periode 2015-2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahun, akan tetapi angka tersebut belum mampu melampaui rata-rata nasional, pada Gambar 1. Untuk mengatasi masalah ini, pada periode 2015-2019 Presiden Joko Widodo telah menetapkan 122 kabupaten/kota dalam kategori daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015. Melalui ditetapkannya aturan ini, maka pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengencangkan pembangunan di daerah tertinggal sehingga kesejahteraan masyarakatnya dapat ditingkatkan.

Kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan dan kunci terlaksananya pembangunan adalah terserapnya pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan dasar penduduk. Pengeluaran pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan IPM yang merupakan kunci kesejahteraan penduduk (Rahmawati & Intan, 2020). Melalui kebijakan APBD yang tepat,

pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran dana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang perekonomian dan aktivitas masyarakat.



Grafik 1: Perbandingan Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal dengan Nasional

Sumber: BPS, 2019, diolah

Secara umum, setiap individu akan melakukan sesuatu berdasarkan atas kepentingannya (Panda & Leepsa, 2017). Perilaku diibaratkan investasi jangka pendek dan jangka panjang yang akan berdampak kepada keuntungan, sedangkan penyedia kebutuhan individu, sebut saja agen, tidak secara tulus memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh para individu, kecuali dengan syarat-syarat tertentu, baik itu berupa sikap maupun material. Dengan demikian, hubungan diantara individu selaku *principal* dan agen berlangsung dalam pola hubungan transaksional, yang jarang sekali menemukan keharmonisan. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat diposisikan sebagai *principal*, sementara perangkat daerah memosisikan dirinya sebagai agen. Masyarakat sudah terlanjur sepenuhnya mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan. Idealnya, selaku agen, kepala daerah beserta aparatnya mampu mengemban amanah tersebut dan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengelola sumber daya daerah tersebut sebaik mungkin dalam bentuk peningkatan ekonomi, pemerataan pembangunan daerah, pengembangan sumber daya, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran, anggaran dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu berdasarkan organisasi yang mengalir pada kementerian dan lembaga, berdasarkan fungsi seperti fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta berdasarkan jenis belanja seperti belanja pegawai, barang/jasa dan lainnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus

menggunakan dana anggaran berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, secara teori, jika jumlah pengeluaran pemerintah daerah untuk masing-masing indikator penyusun IPM (kesehatan, ekonomi, dan pendidikan) bernilai besar, maka seharusnya angka 3 indikator IPM juga meningkat.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis peran pengeluaran pemerintah daerah sebagai instrumen pendanaan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, baik di tingkat provinsi seperti (Regina et al., 2020); (Widodo et al., 2019); (Simatupang & Sinaga, 2020); (Nainggolan et al., 2022); dan (Maharda & Aulia, 2020) maupun di tingkat kabupaten/kota seperti (Nurvita et al., 2022); (Fadilah et al., 2018); (Rahmawati & Intan, 2020); (Fattah & Muji, 2012); dan (Wakarmamu & Indrayono, 2019). Sebagian besar studi terdahulu menemukan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah daerah yang besar terbukti efektif dalam meningkatkan angka IPM.

Penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM atau kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan, namun sebagian besar studi sebelumnya belum banyak yang menguji secara spesifik setiap fungsi pengeluaran pemerintah daerah yang berpotensi meningkatkan tiga indikator tersusunnya IPM yaitu kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan pengeluaran pemerintah daerah dan angka indeks IPM gabungan sehingga tidak dapat diketahui di bagian fungsi pengeluaran pemerintah daerah yang mana yang tidak efektif dalam meningkatkan tiga indikator IPM. Di samping itu, penelitian sebelumnya juga masih terbatas dalam menganalisis peran pengeluaran pemerintah daerah terhadap IPM di daerah-daerah tertinggal. Padahal, analisis ini penting dilakukan di daerah-daerah khusus seperti daerah tertinggal untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah telah efektif dalam meningkatkan IPM, mengingat selama ini IPM di daerah tertinggal cenderung lebih rendah jika dibandingkan di daerah lainnya.

Berdasarkan *gap research* yang ditemukan, penelitian ini bertujuan untuk menguji setiap fungsi pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terhadap tiga indikator penyusun IPM yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di 122 daerah tertinggal di Indonesia pada periode 2015-2018. Studi ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana peran pengeluaran pemerintah daerah dalam meningkatkan 3 indikator IPM secara lebih spesifik sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih tepat.

METODE

Penelitian kuantitatif ini bermaksud untuk mengestimasi efek variabel independen/penjelas berupa fungsi pengeluaran pemerintah daerah (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) terhadap variabel dependen berupa IPM (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi). Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda, dengan pendekatan *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), atau

random effect model (REM) tergantung hasil penentuan model estimasi mana yang tepat. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dengan data *time series*. Sasaran penelitian adalah daerah tertinggal yang ada di Indonesia, dengan populasi penelitian sebagaimana ditetapkan Perpres No. 131 Tahun 2015, sejumlah 122 kabupaten/kota (Pemerintah Republik Indonesia, 2015). Dengan teknik sampling jenuh, seluruh unit populasi menjadi sampel penelitian. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yang dapat diunduh dari sumber data, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Data yang dikumpulkan adalah data selama 4 tahun dari 2015-2018.

Indikator kesehatan pada IPM diukur dengan menggunakan logaritma umur harapan hidup penduduk saat lahir (LOGUHH), indikator pendidikan pada IPM diukur dengan menggunakan logaritma harapan lama sekolah (LOGHLS), dan indikator ekonomi pada IPM diukur dengan menggunakan logaritma pengeluaran per kapita yang disesuaikan (LOGPPK). Sementara itu, pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dilihat dari logaritma dari total realisasi pengeluaran yang telah digunakan untuk fungsi kesehatan (LOGPPDKES), pendidikan (LOGPPDPEND), dan ekonomi (LOGPPDEKO) selama satu tahun.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa variabel makroekonomi yang berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka IPM yaitu kemiskinan (Regina et al., 2020); (Syafri & Firdayeti, 2022); (Nainggolan et al., 2022) dan pertumbuhan penduduk (Sofilda & Hamzah, 2015). Oleh karena itu, kedua variabel tersebut juga dianalisis dalam penelitian ini. Pemilihan kedua variabel ini didasari pada pemahaman bahwa kemiskinan dan pertumbuhan penduduk merupakan masalah klasik yang masih dihadapi di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Di dalam penelitian ini, pertumbuhan jumlah penduduk (POP) diukur dengan mengurangi total penduduk tahun sekarang dengan tahun lalu yang kemudian dibagi dengan total penduduk tahun lalu sementara itu variabel kemiskinan (POV) dilihat dari persentase perbandingan jumlah penduduk yang tergolong miskin dengan total penduduk. Dengan demikian, dengan memodifikasi persamaan dari studi sebelumnya (Fadilah et al., 2018), maka penelitian ini mengembangkan 3 persamaan regresi yang dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{LOGUHH}_{i,t} = c + \beta_1 \text{LOGPPDKES}_{i,t} + \beta_2 \text{POV}_{i,t} + \beta_3 \text{POP}_{i,t} + e_{i,t} \quad (1)$$

$$\text{LOGHLS}_{i,t} = c + \beta_1 \text{LOGPPDPEND}_{i,t} + \beta_2 \text{POV}_{i,t} + \beta_3 \text{POP}_{i,t} + e_{i,t} \quad (2)$$

$$\text{LOGPPK}_{i,t} = c + \beta_1 \text{LOGPPDEKO}_{i,t} + \beta_2 \text{POV}_{i,t} + \beta_3 \text{POP}_{i,t} + e_{i,t} \quad (3)$$

Dimana $\text{LOGUHH}_{i,t}$, merupakan indikator kesehatan IPM berupa logaritma umur harapan hidup, $\text{LOGHLS}_{i,t}$, adalah indikator pendidikan IPM berupa logaritma harapan lama

sekolah, dan $PPK_{i,t}$ merupakan indikator ekonomi dari IPM berupa logaritma pengeluaran per kapita penduduk di 122 daerah tertinggal di Indonesia pada periode 2015-2018. $LOGPPDKES_{i,t}$, $LOGPPDPEND_{i,t}$, dan $LOGPPDEKO_{i,t}$ adalah logaritma pengeluaran pemerintah daerah dalam fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di 122 daerah tertinggal di Indonesia pada 2015-2018. $POV_{i,t}$ merupakan persentase tingkat kemiskinan penduduk dan $POP_{i,t}$ adalah pertumbuhan jumlah penduduk di 122 kabupaten dan kota tertinggal di Indonesia pada 2015-2018. C merupakan konstanta, β_1 , β_2 , β_3 , dan β_4 adalah koefisien regresi dari variabel bebas, $e_{i,t}$ adalah *error*, dan i,t merupakan residual.

Sebelum dilakukan pengujian regresi, analisis regresi pada data panel sebelumnya harus memilih model estimasi mana yang paling tepat untuk diterapkan, antara CEM, FEM, dan REM. Alat yang digunakan adalah Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata umur harapan hidup (UHH) di 122 daerah tertinggal di Indonesia selama periode 2015-2018 sebesar 65,43 tahun. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 70,985 tahun. Nilai minimum UHH tercatat sebesar 53,6 tahun yang diperoleh oleh Kabupaten Nduga di Provinsi Papua pada 2015, sementara UHH tertinggi diraih oleh Kabupaten Bengkayang pada 2018 sebesar 73,28 tahun. Indikator IPM berupa harapan lama sekolah (HLS) di 122 daerah tertinggal selama 2015-2018 memiliki rata-rata sebesar 11,69 tahun. Artinya, rata-rata HLS di daerah tertinggal masih berada di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 12,75 tahun.

Tabel 1: Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	UHH **	HLS **	PPK ****	PPDKES *	PPDPEND *	PPDEKO *	POV ***	POP ***
Mean	65.43	11.69	7361.5	110624.	169435.4	75852.36	21.37	1.64
Max	73.28	14.29	11496	373388.2	1032962	510961.9	45.74	5.20
Min	53.6	2.17	3625.	0	0	0	5.25	0.14
Std. Dev.	3.29	1.88	1591.9	81825.35	173811.3	46599.50	9.67	0.887
Sum	31930	5706	3592421	5398452	82684472	3701595	10429	804.2
Obs.	488	488	488	488	488	488	488	488

Keterangan: *) dalam Rp Juta, **) dalam tahun, ***) dalam %, ****) dalam Rp Ribu

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Angka harapan lama sekolah terendah diraih oleh Kabupaten Nduga yang hanya sebesar 2,17 tahun pada 2015, sedangkan harapan lama sekolah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Aceh Singkil pada 2018 sebesar 14,29 tahun. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di daerah tertinggal selama 2015-2018 sebesar Rp 7.361.250 dan berada di bawah nasional yang telah mencapai Rp

10.573.000. Kabupaten Nduga menjadi daerah dengan angka pengeluaran per kapita terendah yaitu hanya sebesar Rp 3.625.000 pada 2015, sementara Kabupaten Sumbawa Barat pada 2018 menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita tertinggi sebesar Rp 11.496.000.

Rata-rata realisasi pengeluaran daerah untuk kesehatan (PPDKES) di daerah tertinggal selama periode 2015-2018 adalah sebesar Rp 110,624 Miliar dengan total pengeluaran sebesar Rp 53,98 Triliun. Selama periode 2015-2018, terdapat beberapa daerah tertinggal dengan realisasi pengeluaran untuk kesehatan sebesar Rp 0 yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Sintang, Konawe Kepulauan, Pulau Taliabu, Yalimo, dan Puncak pada 2015, Kabupaten Nias Utara, Kepulauan Mentawai, Musi Rawas Utara, Bangkalan, Lombok Tengah, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Mahakam Ulu, Konawe Kepulauan, Buru Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Yapen, Paniani, Intan Jaya pada 2016 dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 2018. Sementara itu, realisasi pengeluaran daerah untuk fungsi kesehatan tertinggi diraih oleh Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 373,39 Miliar pada tahun 2018.

Total pengeluaran daerah untuk fungsi pendidikan (PPDPEND) di 122 daerah tertinggal selama periode 2015-2018 tercatat sebesar Rp 82,68 Triliun, dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp 169,43 Milyar. Terdapat beberapa daerah yang tidak mencatatkan pengeluaran untuk fungsi pendidikan selama 2015-2018 yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumba Barat, Sintang, Konawe Kepulauan, Pulau Taliabu, Yalimo dan Puncak pada 2015, Kabupaten Nias Utara, Kepulauan Mentawai, Musi Rawas Utara, Bangkalan, Lombok Tengah, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Mahakam Ulu, Konawe Kepulauan, Buru Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Yapen, Paniai dan Intan Jaya pada 2016, Kabupaten Dogiyai pada 2017 dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 2018. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang pada 2018 menjadi daerah dengan realisasi pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan tertinggi yaitu mencapai Rp 1,033 Triliun.

Pada fungsi pengeluaran pemerintah daerah lainnya yaitu fungsi ekonomi (PPDEKO), total realisasi pengeluaran di daerah tertinggal pada periode 2015-2018 mencapai Rp 37,01 Triliun dengan rata-rata realisasi pengeluaran sebesar Rp 75,85 Milyar. Daerah tertinggal dengan realisasi pengeluaran Rp 0 untuk fungsi ekonomi di antaranya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, Sintang, Konawe Kepulauan, Pulau Taliabu, Yalimo, dan Puncak pada 2015, Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Musi Rawas Utara, Bangkalan, Lombok Tengah, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Mahakam Ulu, Konawe Kepulauan, Buru Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Yapen, Paniai, dan Intan Jaya pada 2016, Kabupaten Dogiyai pada 2017, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 2018. Kabupaten Sambas pada 2018 menjadi daerah dengan realisasi pengeluaran untuk fungsi ekonomi tertinggi selama 2015-2018 yaitu mencapai Rp 510,96 Milyar.

Berdasarkan hasil deskripsi data, rata-rata kemiskinan (POV) di daerah tertinggal pada tahun 2015-2018 tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 21,37% dari total populasi. Rata-rata tingkat kemiskinan di daerah tertinggal tercatat dua kali lebih tinggi dibanding

dengan rata-rata tingkat kemiskinan nasional yang hanya sebesar 10,63% pada periode 2015-2018. Daerah dengan tingkat kemiskinan terendah diraih oleh Kabupaten Nunukan pada 2015 dengan tingkat kemiskinan hanya 5,25%, sedangkan Kabupaten Dogiyai menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 45,74% pada tahun 2015. Selain itu, rata-rata laju pertumbuhan penduduk (POP) di 122 daerah tertinggal pada 2015-2018 tercatat sebesar 1,65%. Kabupaten Raja Ampat pada 2018 menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah yaitu hanya 0,14%, sedangkan Kabupaten Mappi pada 2018 menjadi kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu mencapai 5,2%.

Hasil analisis lainnya memperlihatkan bahwa hampir seluruh variabel yang diteliti di dalam penelitian ini menunjukkan nilai standar deviasi yang lebih kecil dibanding nilai rata-ratanya (Kecuali variabel PDPEND). Hal ini mengindikasikan bahwa data menyebar secara homogen dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara varians dengan nilai rata-ratanya. Sementara itu, standar deviasi pada variabel PDPEND menunjukkan nilai sebesar 173.811,3 atau lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya yang hanya sebesar 169.435,4. Hal ini membuktikan bahwa data menyebar secara heterogen dan terdapat penyimpangan yang signifikan antara varians dengan nilai rata-ratanya.

Hasil Uji Chow

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai probability pada Model 1, Model 2, dan Model 3 menunjukkan angka $0 < 5\%$. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh model persamaan regresi yang diusulkan pada penelitian ini memilih FEM daripada CEM. Dalam hal ini perlu dilakukan untuk pengujian selanjutnya yaitu penentuan model regresi untuk memilih FEM atau REM dengan menggunakan Uji Hausman.

Tabel 2: Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	df	Prob.	Keputusan
Model 1				
Cross-section F	1.883459	(121,363)	0,0000	
Cross-section Chi-square	237.773873	121	0,0000	Memilih FEM
Model 2				
Cross-section F	2.834287	(121,363)	0,0000	
Cross-section Chi-square	324.588180	121	0,0000	Memilih FEM
Model 3				
Cross-section F	3.020981	(121,363)	0,0000	
Cross-section Chi-square	339.959297	121	0,0000	Memilih FEM

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Hasil Uji Hausman

Hasil Uji Hausman pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probability pada Model 1, Model 2, dan Model 3 masing-masing menunjukkan angka lebih kecil dibanding 5%. Hal ini membuktikan bahwa model estimasi regresi yang paling tepat untuk diterapkan pada ketiga model dalam penelitian ini adalah FEM daripada REM atau CEM, sehingga tidak diperlukan pengujian penentuan model selanjutnya.

Tabel 3: Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	Keputusan
Model 1				
Cross-section random	19.723205	3	0.0002	Memilih FEM
Model 2				
Cross-section random	34.458504	3	0.0000	Memilih FEM
Model 3				
Cross-section random	21.240131	3	0.0001	Memilih FEM

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Hasil Uji Regresi dengan Fixed Effect Model

Tabel 4 menjelaskan mengenai hasil regresi data panel dengan menggunakan pendekatan FEM pada ketiga model yang diajukan dalam penelitian ini. Interpretasi pertama dari hasil model yang terpilih yaitu dengan membentuk persamaan regresi pada setiap model.

Tabel 4: Hasil Uji FEM

Variable	Model 1 (Prob./Coef.)	Model 2 (Prob./Coef.)	Model 3 (Prob./Coef.)
C	0.0000*** (1.828053)	0.0000*** (1.058360)	0.0000*** (3.896398)
LOGPPDKES	0.5180 (-0.0002940)	-	-
LOGPPDPEND	-	0.4149 (0.001393)	-
LOGPPDEKO	-	-	0.0473** (0.003102)
POV	0.0161** (-0.034617)	0.0605* (-0.107644)	0.0000*** (-0.303998)
POP	0.2260 (-0.143295)	0.2325 (0.564682)	0.2961 (-0.452997)
Adjusted-R ²	0.304458	0.432646	0.531353
Prob. (F-Stat)	0.0000***	0.0000***	0.0000***
F-Statistik	2.719140	3.994920	5.452922

Dependent: LOGUHH (Model 1), LOGHLS (Model 2), LOGPPK (Model 3)

***) p < 0.01 **) p < 0.05 *) p < 0.1 C : Constant

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil FEM pada Tabel 2, maka hasil persamaan regresi pada ketiga model adalah sebagai berikut:

$$\text{LOGUHH}_{i,t} = 1.828053 - 0.000294\text{LOGPPDKES}_{i,t} - 0.034617\text{POV}_{i,t} - 0.143295\text{POP}_{i,t} + e_{i,t} \quad (4)$$

$$\text{LOGHLS}_{i,t} = 1.058360 + 0.001393\text{LOGPPDPEND}_{i,t} - 0.107644\text{POV}_{i,t} + 0.564682\text{POP}_{i,t} + e_{i,t} \quad (5)$$

$$\text{LOGPPK}_{i,t} = 3.896398 + 0.003102\text{LOGPPDEKO}_{i,t} - 0.303998\text{POV}_{i,t} - 0.452997\text{POP}_{i,t} + e_{i,t} \quad (6)$$

Di mana: Model 1 (Persamaan 4) menjelaskan mengenai dampak pengeluaran pemerintah (untuk kesehatan), tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan penduduk terhadap Umur Harapan Hidup (LOGUHH) sebagai representasi dari IPM untuk indikator kesehatan di 122 daerah tertinggal pada periode 2015-2018. Model 2 (Persamaan 5) menjelaskan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah (untuk pendidikan), tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan penduduk terhadap Harapan Lama Sekolah (LOGHLS) yang merupakan indikator pendidikan IPM di 122 daerah tertinggal pada periode 2015-2018. Sementara pada Model 3, (Persamaan 6) menjelaskan mengenai efek pengeluaran pemerintah daerah (untuk ekonomi), tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan penduduk terhadap Pengeluaran Per Kapita (LOGPPK) sebagai perwakilan dari IPM untuk indikator ekonomi di 122 daerah tertinggal pada periode 2015-2018.

Berdasarkan hasil uji FEM pada Model 1, nilai koefisien pada konstanta menunjukkan angka sebesar 1.828053 dengan probability $0 < 1\%$, 5% , atau 10% . Hal ini mengartikan jika LOGPPDKES, POV, dan POP bernilai nol atau konstan, maka LOGUHH bernilai 1.828053. Pada Model 2, koefisien regresi pada konstanta bernilai 1.058360 dengan *probability* sebesar $0 < 1\%$, 5% , atau 10% yang menandakan bahwa jika variabel LOGPPDPEND, POV, dan POP bernilai nol atau konstan, maka LOGHLS bernilai 1.058360. Sementara itu, pada Model 3, nilai *probability* pada konstanta tercatat sebesar $0 < 1\%$, 5% , atau 10% dengan koefisien regresi sebesar 3.896398 yang mengindikasikan bahwa jika variabel LOGPPDEKO, POV, dan POP bernilai nol atau konstan, maka LOGPPK bernilai 3.896398.

Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan FEM menunjukkan bahwa hanya pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikator IPM yaitu Pendapatan Per Kapita penduduk (Model 3). Hal ini ditunjukkan oleh nilai *probability* LOGPPDEKO sebesar $0.0473 < 5\%$ dengan koefisien regresi tercatat sebesar 0.003102. Hasil ini mengindikasikan bahwa jika pengeluaran pemerintah untuk fungsi ekonomi meningkat sebesar 1% di 122 daerah tertinggal di Indonesia, maka dapat meningkatkan pengeluaran per kapita penduduk sebesar 0.03102%. Pengeluaran pemerintah adalah komponen yang krusial untuk menggairahkan aktivitas perekonomian yang ada di daerah. Dengan adanya anggaran untuk fungsi ekonomi, maka pemerintah dapat membangun infrastruktur yang dapat menunjang aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat seperti pasar dan pusat

perbelanjaan, bendungan, jalan tol dan lainnya (Eliza, 2015). Selain itu, daerah tertinggal cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah jika dibandingkan daerah lain. Sehingga, dalam hal ini anggaran untuk fungsi ekonomi juga telah dialokasikan pada pengeluaran fisik seperti pembangunan infrastruktur perekonomian dan non fisik seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan subsidi. Dengan demikian, semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk fungsi ekonomi maka tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat semakin tinggi yang ditandai dengan adanya pengeluaran (Muliza et al., 2017).

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan tidak cukup mampu dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup (LOGUHH) sebagai indikator kesehatan IPM (Model 1). Hal ini dibuktikan oleh nilai *probability* pada variabel LOGPPDKES yang tercatat sebesar $0.5180 > 1\%$, 5% , atau 10% dengan koefisien regresi sebesar -0.000294 . Hal ini dapat disebabkan karena sebagian besar dana hanya digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang bentuknya fisik saja seperti rumah sakit dan puskesmas (Sanggolongan et al., 2015). Hal ini diperkuat dengan adanya anggaran kesehatan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan yang sebagian besar sifatnya fisik seperti pengadaan kendaraan farmasi, ambulans, gedung kantor, pembangunan puskesmas keliling, dan sebagainya (Muliza et al., 2017). Semua jenis pengeluaran ini menandakan bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah dalam fungsi kesehatan masih terfokus untuk digunakan pada pengeluaran yang sifatnya kuratif (penyembuhan) daripada preventif (pencegahan) (Muliza et al., 2017). Pengeluaran jenis ini dikhawatirkan akan membuat beban anggaran semakin berat dalam jangka panjang (Mongan, 2019).

Sementara itu, Model 2 memperlihatkan hasil yang sama bahwa pengeluaran pemerintah pada fungsi pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikator pendidikan IPM yaitu Harapan Lama Sekolah (LOGHLS). Nilai *probability* pada variabel LOGPPDPEND tercatat lebih besar dibanding 1% , 5% , atau 10% yaitu 0.4149 dengan koefisien regresi sebesar 0.001393 . Sebagian besar anggaran pendidikan di daerah masih terfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan yang sifatnya fisik saja, sementara anggaran untuk pelatihan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran masih terbatas (Muliza et al., 2017). Hal ini menyebabkan dana pemerintah untuk sektor pendidikan kurang memberikan dampak yang signifikan pada meningkatnya kualitas pendidikan dan harapan lama sekolah siswa. Selain itu, anggaran pendidikan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik juga dikhawatirkan belum dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek sehingga tidak secara langsung dapat memberikan efek yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pendidikan di daerah tertinggal.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa variabel kontrol berupa tingkat kemiskinan penduduk di daerah tertinggal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi IPM yang diukur dengan LOGUHH (Model 1), LOGHLS (Model 2), dan LOGPPK (Model 3), namun pertumbuhan jumlah penduduk

(POP) tidak berpengaruh signifikan terhadap tiga indikator IPM. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *probability* tingkat pertumbuhan penduduk yang memperlihatkan angka lebih besar dari 1%, 5%, atau 10% pada ketiga Model yaitu 0.2260 (Model 1), 0.2325 (Model 2), dan 0.2961 (Model 3). Sementara itu, nilai *probability* variabel tingkat kemiskinan pada Model 1 menunjukkan angka sebesar $0.0161 < 5\%$ dengan koefisien regresi sebesar -0.034617 yang berarti jika tingkat kemiskinan penduduk di 122 daerah tertinggal meningkat sebesar 1%, maka akan mengurangi Umur Harapan Hidup (LOGUHH) penduduk sebesar 0.34617%. Pada Model 2, variabel tingkat kemiskinan penduduk memiliki nilai *probability* sebesar $0.0605 < 10\%$ dengan koefisien regresi sebesar -0.107644 . Hasil ini menandakan bahwa jika tingkat kemiskinan penduduk di daerah tertinggal meningkat 1%, maka akan mengurangi angka Harapan Lama Sekolah (LOGHLS) sebesar 1.07644%. Sedangkan, nilai *probability* tingkat kemiskinan pada Model 3 tercatat sebesar $0 < 1\%, 5\%, 10\%$ dengan koefisien regresi sebesar -0.303998 . Hal ini mengindikasikan bahwa jika tingkat kemiskinan di daerah tertinggal meningkat sebesar 1%, maka dapat mengurangi pengeluaran per kapita penduduk (LOGPPK) sebesar 3,03998%.

Beberapa penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal yang dapat berdampak negatif terhadap IPM yaitu 1) adanya ketimpangan pembangunan, pendapatan, dan ekonomi yang masih tinggi antara daerah tertinggal dengan daerah lain, 2) tingkat pengangguran yang masih tinggi dan upaya penanggulangannya yang belum optimal di daerah tertinggal dan 3) kondisi inflasi yang masih cukup tinggi di daerah pedesaan atau tertinggal (Regina et al., 2020). Kondisi ini membuat tingkat kemiskinan menjadi tidak terkendali di daerah tertinggal yang akhirnya berdampak domino terhadap penurunan IPM khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Tarumingkeng et al., 2021).

Adjusted R² pada Tabel 4 mengartikan bahwa variabel independen LOGPPDKES, POV, dan POP pada Model 1 mampu menjelaskan variabel LOGUHH sebesar 30.4458%, variabel LOGPPDPEND, POV, dan POP mampu menjelaskan variabel LOGHLS sebesar 43.2646% (Model 2), dan pada Model 3, variabel LOGPPDEKO, POV, dan POP mampu menerangkan variabel dependen LOGPPK sebesar 53.1353%. Terakhir, namun tidak kalah penting, Nilai Prob. (F-statistik) yang menjelaskan pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen pada ketiga model, semua menunjukkan angka $0 < 1\%, 5\%, \text{ atau } 10\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa baik di Model 1, Model 2, atau Model 3, jika seluruh variabel independen diuji secara bersamaan maka berpengaruh signifikan terhadap indikator IPM berupa UHH, HLS, dan PPK.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah di 122 daerah tertinggal di Indonesia pada 2015-2018 belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal

ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa hanya pengeluaran pemerintah dalam fungsi ekonomi saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada indikator ekonomi. Di sisi lain, dana pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal, padahal dua fungsi pengeluaran ini memiliki porsi yang cukup besar dibanding porsi fungsi pengeluaran yang lain. Selain itu, variabel lain yang mempengaruhi IPM di daerah tertinggal selama 2015-2018 adalah kemiskinan. Hal ini disebabkan karena tingkat kemiskinan dan ketimpangan di daerah tertinggal cenderung masih tinggi dibanding dengan daerah lain.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pemerintah daerah tertinggal disarankan untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah yang terfokus bukan hanya pada infrastruktur fisik, namun juga non fisik seperti pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidik dan siswa, dan pengeluaran yang sifatnya preventif atau pencegahan. Kekurangan dalam penelitian ini, yang dapat menjadi bahan perbaikan pada penelitian-penelitian di masa depan yaitu 1) Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R2* cenderung masih rendah yaitu 30% (Model 1), 43% (Model 2), dan 53% (Model 3). Hal ini mengindikasikan masih banyaknya variabel lain yang berpotensi dapat menjelaskan variabel IPM. 2) Penelitian selanjutnya dapat mencari dan mengganti pengukuran setiap indikator pembentuk IPM (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) lainnya yang lebih sesuai dan lebih tepat untuk diterapkan.

PERNYATAAN RESMI

Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan naskah ini hingga selesai.

REFERENSI

- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 7(3), 198–208. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/pekbis.7.3.198-208>
- Fadilah, A., Ananda, C. F., & Kaluge, D. (2018). A panel approach: how does government expenditure influence human development index? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(2), 130–138. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um002v10i22018p130>
- Fattah, S., & Muji, A. (2012). Local government expenditure allocation toward human development index at jeneponto regency, South Sulawesi, Indonesia. . . *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 5(6), 40–50. <https://core.ac.uk/download/pdf/25490481.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, K. R. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran*

(Kementerian).

- Maharda, J. B., & Aulia, B. Z. (2020). Government Expenditure and Human Development in Indonesia. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6901>
- Mongan, J. J. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di provinsi Aceh. *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Nainggolan, L. E., Lie, D., Nainggolan, N. T., & Siregar, R. T. (2022). How Determinants of the Human Development Index Impact Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(2), 688–701. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v5i2.2477>
- Nurvita, D., Rohima, S., Bashir, A., & Mardalena, M. (2022). The Role of Public Spending on Education, Health, and Economic Growth toward Human Development Index in the Local Economy. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(2), 197–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.197-210>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pemerintah Republik Indonesia, R. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*. Presiden Republik Indonesia.
- Rahmawati, F., & Intan, M. N. (2020). Government Spending, Gross Domestic Product, Human Development Index (Evidence from East Java Province). *KnE Social Sciences*, 774–786. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6641>
- Regina, R., Sinring, B., & Arifin, A. (2020). Analysis the Effects of Poverty, General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index (HDI) in Indonesia. *Jurnal Economic Resource*, 3(1), 1–12. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/JER/article/view/300/201>
- Sanggalorang, S., Rumat, V., & Siwu, H. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8686>
- Simatupang, M., & Sinaga, B. M. (2020). Impact of Financial Inclusion, Government Expenditures in Education and Health Sectors on Human Development in Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 9(2), 5–17. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939882>

- Sofilda, E., & Hamzah, M. Z. (2015). Government Spending Contributions on per Capita Income and its Effect toward the Human Development Index (Comparative Study between Western Indonesia and Central & East Indonesia). *Journal of Social and Development Sciences*, 6(3), 43–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.22610/jsds.v6i3.851>
- Syafri, S., & Firdayeti, K. H. (2022). Determinants of Human Development Index: Case Study of Provinces in Indonesia. *EUDL: European Union Digital Library*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315091>
- Tarumingkeng, W. A., Rumate, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2021). Pengaruh belanja modal dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 82–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32728.19.2.2018>
- United Nations Development Program, U. (2015). *Human Development Report 2015*.
- Wakarmamu, T., & Indrayono, Y. (2019). Spending and development in Papua province of Indonesia. *Management Science Letters*, 9(12), 2131–2142. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2019.6.021>
- Widodo, P., Irawan, L. A., Oktavianti, I. N., & Anisa, L. (2019). Government spending on education, health, and minimum wages as predictors of human development index: the study of selected provinces of Indonesia. *International Journal of Advanced Economics*, 1(2), 95–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.51594/ijae.v1i2.57>